

Peran Kepala Sekolah dalam Menumbuhkan Budaya Anti Korupsi di Lingkungan Sekolah

Hendro Juwono

Sekolah Tinggi Islam Blambangan (STIB) Banyuwangi, Indonesia

Email: hendrojuwono@gmail.com

Abstrak. Korupsi merupakan salah satu permasalahan krusial yang mengancam keberlangsungan pembangunan nasional dan merusak nilai-nilai kehidupan berbangsa. Pendidikan dipandang sebagai instrumen strategis dalam membentuk karakter antikorupsi sejak dini, dengan sekolah sebagai garda terdepan dalam upaya tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran kepala sekolah dalam menumbuhkan budaya anti korupsi di lingkungan sekolah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala sekolah memiliki peran sentral dalam membentuk budaya anti korupsi, yang tercermin dalam tiga fungsi utama: sebagai pembuat kebijakan yang menetapkan aturan dan program berbasis nilai-nilai integritas; sebagai pendidik yang menanamkan dan memberi keteladanan sikap antikorupsi kepada warga sekolah; serta sebagai evaluator yang secara rutin menilai efektivitas program dan praktik antikorupsi di sekolah. Ketiga peran ini berjalan secara sinergis dalam menciptakan lingkungan sekolah yang bersih, transparan, dan berintegritas. Oleh karena itu, penguatan kapasitas kepala sekolah dalam menjalankan peran tersebut sangat penting untuk mendukung gerakan nasional pemberantasan korupsi melalui jalur pendidikan.

Kata Kunci: Kepala Sekolah, Budaya Anti Korupsi, Pendidikan Karakter

Abstract. *Corruption is one of the crucial problems that threatens the sustainability of national development and damages the values of national life. Education is seen as a strategic instrument in forming an anti-corruption character from an early age, with schools as the vanguard in this effort. This study aims to describe the role of school principals in fostering an anti-corruption culture in the school environment. This study uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques through in-depth interviews, observation, and documentation. The results of the study indicate that school principals have a central role in forming an anti-corruption culture, which is reflected in three main functions: as*

**Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
Sekolah Tinggi Islam Blambangan (STIB) Banyuwangi**

policy makers who establish rules and programs based on integrity values; as educators who instill and provide examples of anti-corruption attitudes to school residents; and as evaluators who routinely assess the effectiveness of anti-corruption programs and practices in schools. These three roles work synergistically in creating a clean, transparent, and integrity-based school environment. Therefore, strengthening the capacity of school principals to carry out these roles is very important to support the national movement to eradicate corruption through education.

Keywords: *Principals, Anti-Corruption Culture, Character Education*

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan masalah krusial yang menghambat proses pembangunan nasional serta merusak tatanan kehidupan masyarakat dan negara. Masalah ini menjadi tanggung jawab bersama yang harus diperangi demi tercapainya tujuan lembaga dan kesejahteraan bangsa. Dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan, pemerintah Indonesia telah menetapkan alokasi anggaran sebesar 20% dari total APBN untuk sektor pendidikan.¹ Praktik korupsi tidak lagi terbatas pada ranah pemerintahan, tetapi juga telah menyusup ke berbagai sektor, termasuk dunia pendidikan. Walaupun berbagai langkah telah ditempuh oleh pemerintah untuk menekan angka korupsi, kenyataannya praktik ini masih kerap ditemukan.² Oleh karena itu, penanggulangan korupsi tidak bisa hanya mengandalkan aspek penegakan hukum, melainkan juga perlu didukung dengan pendekatan pencegahan dan pendidikan sejak dini, salah satunya melalui penerapan pendidikan antikorupsi di lingkungan sekolah.

Sebagai lembaga pendidikan formal, sekolah memegang peranan penting dalam membentuk peserta didik yang memiliki nilai kejujuran, tanggung jawab, dan integritas. Di dalam lingkungan sekolah, kepala sekolah menjadi aktor utama dalam memimpin dan mengarahkan terciptanya budaya positif. Perannya tidak

¹ Munawaroh, S., Nailufar, R., & Nabilah, S. (2023). Peran Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Membangun Ekosistem Anti Korupsi di Era Society 5.0. In *Gunung Djati Conference Series* (Vol. 36, pp. 47-60).

² Nurudin, N., Fauzi, M. A. N., & Barory, C. (2024). Pendidikan Anti Korupsi: Konsep Pendidikan Karakter Dan Tantangannya. *Educatus*, 2(1), 19-26.

hanya terbatas pada aspek administratif, tetapi juga sebagai pemimpin visioner yang berperan dalam menciptakan lingkungan belajar yang berintegritas. Slamet menyatakan bahwa kepala sekolah merupakan elemen kunci dalam peningkatan mutu pendidikan, sehingga dituntut memiliki visi dan misi yang jelas, wawasan yang luas, serta kompetensi profesional dalam merencanakan, mengelola, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pendidikan.³

Dalam konteks ini, budaya anti korupsi dapat dibentuk melalui pendekatan kebijakan yang bijak, keteladanan yang konsisten, serta pembiasaan nilai-nilai karakter dalam keseharian warga sekolah. Karakter sendiri mencakup sikap, perilaku, motivasi, dan keterampilan yang dimiliki oleh individu.⁴ Oleh karena itu, pendidikan karakter menjadi elemen penting dalam dunia pendidikan saat ini. Sejalan dengan itu, Slamet, Fitria, dan Irawan menekankan bahwa pembentukan karakter adalah suatu proses yang bertujuan menghasilkan hasil pendidikan yang ideal dan berkelanjutan.⁵ Menurut Suyatno, budaya sekolah merupakan sistem nilai, kepercayaan, dan norma yang berkembang dalam lingkungan sekolah dan diwujudkan dalam sikap dan perilaku seluruh warga sekolah.⁶ Dalam konteks ini, kepala sekolah memiliki tanggung jawab untuk menanamkan budaya anti korupsi sebagai bagian dari karakter sekolah. Kepala sekolah yang mampu menjadi teladan dalam kejujuran dan tanggung jawab akan memberi pengaruh besar terhadap perilaku guru, staf, dan siswa.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam modul pendidikan antikorupsi tahun 2020 menegaskan bahwa nilai-nilai antikorupsi perlu diintegrasikan ke dalam proses pembelajaran di sekolah. Pengintegrasian ini tidak hanya terbatas pada mata pelajaran, tetapi juga mencakup aktivitas sekolah dan budaya yang berkembang di

³ Slamet, S. (2022). Peran Kepala Sekolah dalam Membangun Citra Publik pada Era 5.0 di Kabupaten Banyuwangi. *DIAJAR: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, 1(3), 268-273.

⁴ Kurniawan, S. (2013). *Pendidikan Karakter*. Yogyakarta: Arruz Media.

⁵ Slamet, S., Fitria, M., & Irawan, V. W. E. (2024). Peran Guru PAI dalam Membentuk Karakter Peserta Didik di SMK NU Darussalam Kecamatan Srono. *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam*, 2(3), 298-305.

⁶ Suyatno. (2015). Budaya Sekolah dan Implementasi Pendidikan Karakter. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 21(3), 253-264.

lingkungan pendidikan.⁷ Pendidikan sendiri merupakan proses berkelanjutan yang memungkinkan individu maupun kelompok memperoleh pengetahuan, keterampilan, serta nilai-nilai melalui kegiatan belajar, pelatihan, dan penelitian, yang diwariskan dari generasi ke generasi. Namun, dalam dunia pendidikan saat ini, korupsi menjadi salah satu tantangan serius yang mengancam keberlangsungan dan kualitas pendidikan, khususnya di jenjang sekolah menengah pertama dan atas.⁸ Oleh karena itu, kepala sekolah sebagai pemangku kebijakan tertinggi di satuan pendidikan memiliki tanggung jawab besar dalam mengarahkan, mengawasi, dan mengevaluasi seluruh proses pembelajaran. Peran tersebut mencakup pembinaan karakter siswa dan penanaman nilai-nilai antikorupsi yang harus terwujud dalam praktik sehari-hari di lingkungan sekolah.

Beberapa penelitian sebelumnya juga mengungkapkan pentingnya peran kepala sekolah dalam membangun budaya anti korupsi. Penelitian oleh Lestari menunjukkan bahwa kepala sekolah yang aktif menerapkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam pengelolaan sekolah mampu menciptakan iklim sekolah yang bersih dan bebas dari praktik kecurangan.⁹ Sementara itu, studi oleh Nugroho menekankan bahwa keteladanan kepala sekolah menjadi faktor utama dalam menumbuhkan kesadaran antikorupsi di kalangan guru dan siswa.¹⁰

Meskipun pendidikan antikorupsi telah diperkenalkan di lingkungan sekolah, penerapannya masih menghadapi berbagai hambatan. Salah satu kendala utama adalah kurangnya pemahaman kepala sekolah mengenai konsep pendidikan karakter yang berlandaskan nilai-nilai antikorupsi, serta belum optimalnya integrasi nilai-nilai tersebut ke dalam program dan kegiatan sekolah secara menyeluruh. Penelitian yang dilakukan oleh Siregar dan Chastanti mengungkapkan bahwa

⁷ Komisi Pemberantasan Korupsi. (2020). *Modul Pendidikan Antikorupsi untuk Pendidikan Dasar dan Menengah*. Jakarta: KPK RI.

⁸ Atqiya, A. B., Dewi, C. K., & Faisal, C. M. (2023). Peran Kepemimpinan Dalam Mengakselerasi Penanganan Korupsi Di Era Digitalisasi 5.0. In *Gunung Djati Conference Series* (Vol. 36, pp. 403-412).

⁹ Lestari, I. D. (2019). Implementasi Komunikasi Efektif Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Motivasi Kerja Guru di SDN Mekarjaya 30 Depok. *SAP (Susunan Artikel Pendidikan)*, 3(3).

¹⁰ Nugroho, A. (2021). Keteladanan Kepala Sekolah dalam Menanamkan Nilai Antikorupsi di Sekolah Menengah Pertama. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 11(1), 45–56.

implementasi pendidikan antikorupsi di sekolah belum berjalan efektif. Hal ini terlihat dari masih banyaknya guru yang belum mengintegrasikan nilai-nilai antikorupsi dalam proses pembelajaran, belum mampu menjadi figur teladan, serta belum menerapkan strategi pembelajaran yang dapat membangkitkan minat dan motivasi siswa untuk menghindari perilaku koruptif.¹¹

Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk mengkaji secara mendalam peran kepala sekolah dalam membentuk budaya antikorupsi di sekolah. Penelitian semacam ini penting untuk mengidentifikasi strategi, kebijakan, serta praktik nyata yang diterapkan kepala sekolah dalam menanamkan nilai integritas dan membangun lingkungan pendidikan yang bebas dari perilaku korupsi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan pendidikan karakter dan antikorupsi di sekolah, serta menjadi referensi bagi kepala sekolah dalam mengimplementasikan budaya antikorupsi secara konkret dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk memahami secara mendalam peran kepala sekolah dalam menumbuhkan budaya anti korupsi di lingkungan sekolah berdasarkan fenomena yang terjadi di lapangan. Menurut Moleong pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami fenomena sosial dari sudut pandang partisipan melalui interaksi langsung dengan subjek penelitian di lingkungan alaminya.¹² Jenis penelitian studi kasus dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi secara intensif dan detail terhadap suatu kasus tertentu dalam konteks nyata, yaitu bagaimana strategi, kebijakan, dan keteladanan kepala sekolah dalam membentuk budaya antikorupsi di satuan pendidikan. Yin menyebutkan bahwa studi kasus cocok digunakan ketika peneliti ingin menjawab pertanyaan

¹¹ Siregar, A. A., & Chastanti, I. (2022). Implementasi Pendidikan Antikorupsi di Sekolah. *Sosial Horizon: Jurnal Pendidikan Sosial*, 9(1), 13-22.

¹² Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

“bagaimana” dan “mengapa” suatu fenomena terjadi, serta ingin mempertahankan karakteristik kontekstual dari kasus tersebut.¹³

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Sementara analisis menggunakan model Miles, Huberman dan Saldana, yang meliputi tiga tahap, yaitu; Reduksi data, Penyajian data dan Penarikan kesimpulan dan verifikasi. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, baik triangulasi sumber (membandingkan informasi dari berbagai informan) maupun triangulasi teknik (membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi).¹⁴ Sugiyono menjelaskan bahwa triangulasi penting dalam penelitian kualitatif untuk menguji konsistensi dan kebenaran data dari berbagai sudut pandang.¹⁵

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepala Sekolah sebagai Pembuat Kebijakan

Kepala sekolah memiliki peran strategis sebagai pembuat kebijakan dalam satuan pendidikan. Peran ini tidak hanya terbatas pada aspek administratif dan manajerial, tetapi juga melibatkan tanggung jawab moral untuk menciptakan lingkungan sekolah yang bersih, transparan, dan berintegritas. Dalam konteks penanaman budaya anti korupsi, kepala sekolah menjadi aktor utama yang menentukan arah, strategi, dan sistem nilai yang berlaku di lingkungan sekolah. Melalui kebijakan-kebijakan yang dibuat, kepala sekolah dapat menanamkan nilai-nilai antikorupsi seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan kepedulian sosial dalam seluruh aspek kehidupan sekolah.

Menurut Schein, pemimpin memiliki peran utama dalam membentuk budaya organisasi melalui kebijakan, perilaku, dan keputusan-keputusan penting yang mereka ambil. Dalam hal ini, kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan menjadi

¹³ Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications Design and Methods (Sixth Editions)*. Singapore: SAGE Publications.

¹⁴ Miles, M.B, Huberman, A.M, & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3*. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.

¹⁵ Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

penentu utama dalam membentuk budaya sekolah yang bersih dari praktik kecurangan.¹⁶ Kebijakan yang dirancang oleh kepala sekolah dapat mencakup berbagai aspek, mulai dari tata kelola keuangan sekolah yang transparan, sistem penghargaan dan sanksi yang adil, hingga integrasi nilai-nilai antikorupsi ke dalam kurikulum dan kegiatan sekolah.

Misalnya, kepala sekolah dapat menetapkan kebijakan internal yang mendukung budaya antikorupsi seperti pelaporan penggunaan dana BOS secara terbuka, pelibatan komite sekolah dan orang tua dalam perencanaan anggaran, serta mendorong pelaksanaan pendidikan karakter melalui kegiatan rutin seperti upacara bendera, apel pagi, dan program pembiasaan positif. Selain itu, kepala sekolah juga berperan dalam membentuk regulasi yang mendukung pengawasan internal, seperti pembentukan tim integritas sekolah atau forum diskusi antikorupsi yang melibatkan siswa dan guru.

Pendapat senada disampaikan oleh Mulyasa, yang menyatakan bahwa kepala sekolah sebagai pemegang kendali manajerial di sekolah memiliki kewenangan untuk menyusun dan mengimplementasikan kebijakan yang mencerminkan nilai-nilai etika dan integritas.¹⁷ Kebijakan yang berpihak pada nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab dapat menjadi alat preventif dalam mencegah terjadinya penyimpangan perilaku di lingkungan sekolah.

Namun, efektivitas peran kepala sekolah sebagai pembuat kebijakan sangat ditentukan oleh kapasitas kepemimpinan dan komitmen moral yang dimilikinya. Seorang kepala sekolah yang memiliki integritas tinggi dan pemahaman yang kuat terhadap pentingnya pendidikan antikorupsi akan cenderung merancang kebijakan yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga transformatif. Kepala sekolah yang seperti ini mampu menjadi motor penggerak perubahan budaya sekolah, dari yang sebelumnya permisif terhadap praktik manipulatif menjadi lebih sadar, kritis, dan bertanggung jawab terhadap nilai-nilai etis.

¹⁶ Schein, E. H. (2010). *Organizational culture and leadership* (Vol. 2). John Wiley & Sons.

¹⁷ Mulyasa, E. (2013). *Pengembangan dan implementasi kurikulum 2013*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Oleh karena itu, peran kepala sekolah dalam membentuk kebijakan sangat penting dalam menciptakan ekosistem sekolah yang bebas dari korupsi. Melalui kebijakan yang terencana, partisipatif, dan bernilai edukatif, kepala sekolah dapat membangun pondasi budaya anti korupsi yang kokoh dan berkelanjutan, yang pada akhirnya berkontribusi dalam mencetak generasi muda yang berintegritas tinggi.

Kepala Sekolah sebagai Pendidik

Dalam fungsi pendidik, kepala sekolah tidak hanya bertugas menyampaikan materi pembelajaran sebagaimana guru, tetapi lebih luas lagi ia menjadi agen transformasi nilai dan pembentuk budaya di lingkungan sekolah. Salah satu nilai krusial yang perlu ditanamkan di era sekarang adalah nilai antikorupsi, mengingat praktik korupsi telah menjadi masalah sistemik yang dapat merusak integritas bangsa. Dalam hal ini, kepala sekolah memiliki tanggung jawab moral dan profesional untuk mendidik seluruh warga sekolah, baik secara langsung maupun tidak langsung, mengenai pentingnya kejujuran, tanggung jawab, transparansi, dan integritas.

Menurut Tantini dan Utama, kepala sekolah sebagai pendidik memiliki peran utama dalam menanamkan nilai-nilai karakter melalui pembinaan, bimbingan, dan keteladanan. Peran ini menjadi sangat penting dalam konteks pendidikan karakter berbasis antikorupsi.¹⁸ Kepala sekolah tidak cukup hanya mengarahkan guru untuk mengajarkan nilai antikorupsi dalam mata pelajaran, tetapi juga harus secara aktif menjadi role model, memberikan arahan moral, dan menciptakan ruang-ruang pembelajaran yang menginternalisasi nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari di sekolah.

Salah satu cara kepala sekolah menjalankan peran sebagai pendidik adalah melalui pembinaan langsung terhadap peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan. Misalnya, kepala sekolah dapat menginisiasi program rutin seperti kultum pagi, forum diskusi siswa, atau kelas inspiratif yang membahas pentingnya integritas dan bahaya korupsi. Ia juga dapat menyisipkan pesan-pesan antikorupsi dalam pidato

¹⁸ Tantini, T., & Utama, M. P. (2015). *Kepemimpinan Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Klaten Tahun 2015/2016* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

atau sambutan di setiap kegiatan sekolah. Hal ini menjadi bentuk pendidikan nilai yang tidak formal namun memiliki dampak psikologis dan moral yang besar.

Selain itu, kepala sekolah sebagai pendidik juga harus membimbing guru-guru dalam mengembangkan model pembelajaran yang kontekstual dan menyentuh aspek moral siswa. Menurut Tilaar, pendidikan tidak hanya berfungsi untuk mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga bertujuan membentuk manusia yang memiliki watak dan kepribadian unggul.¹⁹ Oleh karena itu, kepala sekolah harus mampu mengarahkan tenaga pendidik untuk mengintegrasikan nilai antikorupsi ke dalam kegiatan belajar mengajar, tidak hanya sebagai materi tambahan, tetapi sebagai nilai yang dihidupkan dan dicontohkan dalam proses pembelajaran.

Kepala sekolah yang efektif dalam perannya sebagai pendidik akan mampu membangun budaya sekolah yang kondusif bagi pembentukan karakter peserta didik. Budaya ini mencerminkan nilai-nilai positif seperti keterbukaan, tanggung jawab, dan keadilan, yang secara tidak langsung menjadi benteng terhadap perilaku menyimpang seperti korupsi. Menurut pendapat Mulyasa, kepala sekolah sebagai pendidik memiliki peran strategis dalam mempengaruhi lingkungan sekolah melalui gaya kepemimpinan yang edukatif dan humanis, serta membangun komunikasi yang efektif dengan seluruh warga sekolah.²⁰

Dengan demikian, kepala sekolah sebagai pendidik memegang peranan penting dalam proses internalisasi nilai-nilai antikorupsi. Melalui pendidikan yang menyentuh aspek afektif dan moral, kepala sekolah membantu menyiapkan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat dalam integritas pribadi. Ini adalah langkah preventif jangka panjang yang sangat strategis dalam membangun masyarakat yang bebas dari korupsi.

Kepala Sekolah sebagai Evaluator

Dalam upaya menumbuhkan budaya anti korupsi di lingkungan sekolah, peran kepala sekolah sebagai evaluator memiliki posisi yang sangat penting.

¹⁹ Tilaar, H. A. R. (2009). *Kekuasaan Pendidikan: Kajian Manajemen Pendidikan Nasional dalam Pusaran Kekuasaan*. Jakarta: Rinika Cipta.

²⁰ Mulyasa, E. (2013). *Pengembangan dan implementasi kurikulum 2013*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Evaluasi bukan hanya sekadar kegiatan administratif untuk menilai keberhasilan program, tetapi menjadi proses reflektif yang memastikan bahwa seluruh aktivitas sekolah berjalan sesuai dengan nilai-nilai integritas, transparansi, dan akuntabilitas. Kepala sekolah sebagai evaluator bertanggung jawab untuk menilai efektivitas kebijakan, program, dan pelaksanaan pendidikan karakter yang mendukung terbentuknya budaya anti korupsi di satuan pendidikan.

Menurut Arikunto, evaluasi merupakan kegiatan sistematis yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tujuan telah tercapai, serta menjadi dasar untuk pengambilan keputusan perbaikan.²¹ Dalam hal ini, kepala sekolah perlu secara rutin melakukan pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan pendidikan antikorupsi, baik yang dilakukan oleh guru maupun peserta didik. Evaluasi ini tidak hanya bersifat kuantitatif, tetapi juga kualitatif, mencakup aspek sikap, perilaku, dan budaya yang terbentuk di sekolah.

Sebagai evaluator, kepala sekolah perlu menyusun indikator evaluasi yang mencerminkan nilai-nilai antikorupsi, seperti kejujuran, tanggung jawab, kedisiplinan, dan kepedulian. Evaluasi dapat dilakukan melalui berbagai instrumen seperti observasi, kuesioner, laporan kegiatan, hingga refleksi dari warga sekolah. Kepala sekolah juga perlu mendorong adanya evaluasi partisipatif, di mana guru, siswa, dan bahkan orang tua dapat terlibat dalam memberikan umpan balik terkait pelaksanaan budaya anti korupsi di sekolah.

Salah satu bentuk konkret evaluasi dalam konteks ini adalah penilaian terhadap integrasi nilai antikorupsi dalam proses pembelajaran. Kepala sekolah dapat mengamati bagaimana guru mengajarkan nilai-nilai tersebut dalam kelas, serta bagaimana siswa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Di sisi lain, kepala sekolah juga dapat mengevaluasi kebijakan internal sekolah, seperti penggunaan dana, pembagian tugas, dan sistem penghargaan-hukuman, apakah sudah mencerminkan prinsip keadilan dan keterbukaan.

Menurut pendapat Mulyasa, kepala sekolah yang berperan sebagai evaluator harus memiliki kepekaan terhadap dinamika yang terjadi di sekolah serta

²¹ Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
**Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
Sekolah Tinggi Islam Blambangan (STIB) Banyuwangi**

kemampuan untuk mengambil keputusan yang berbasis data dan analisis mendalam.²² Hal ini penting agar evaluasi tidak hanya menjadi rutinitas formal, tetapi benar-benar menjadi instrumen peningkatan mutu dan budaya sekolah. Evaluasi yang baik juga harus diikuti dengan tindak lanjut yang konkret, seperti revisi kebijakan, peningkatan kompetensi guru, atau pembinaan terhadap siswa.

Melalui evaluasi yang sistematis dan berkelanjutan, kepala sekolah dapat memastikan bahwa upaya penanaman budaya antikorupsi tidak berhenti pada tataran wacana, tetapi benar-benar terimplementasi dalam tindakan nyata dan budaya kolektif sekolah. Evaluasi juga membantu dalam mengidentifikasi hambatan serta peluang yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat pendidikan karakter antikorupsi secara lebih strategis.

Dengan demikian, kepala sekolah sebagai evaluator berperan penting dalam menjaga konsistensi nilai-nilai antikorupsi dalam setiap aspek kehidupan sekolah. Evaluasi yang dilakukan secara objektif, partisipatif, dan berkelanjutan menjadi fondasi dalam membangun budaya sekolah yang bersih, transparan, dan berintegritas tinggi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa kepala sekolah memiliki peran yang sangat strategis dalam menumbuhkan budaya anti korupsi di lingkungan sekolah. Peran tersebut mencakup tiga dimensi utama, yaitu sebagai pembuat kebijakan, sebagai pendidik, dan sebagai evaluator. Sebagai pembuat kebijakan, kepala sekolah berperan dalam merancang dan menetapkan kebijakan yang mendukung terciptanya lingkungan sekolah yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Kebijakan yang baik menjadi landasan untuk mencegah praktik penyimpangan serta menjadi pedoman perilaku seluruh warga sekolah.

Dalam kapasitasnya sebagai pendidik, kepala sekolah tidak hanya menyampaikan nilai-nilai moral secara langsung, tetapi juga menjadi teladan dalam kehidupan sehari-hari. Ia bertanggung jawab dalam membina guru dan siswa agar

²² Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
**Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
Sekolah Tinggi Islam Blambangan (STIB) Banyuwangi**

nilai-nilai antikorupsi seperti kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin dapat tertanam melalui kegiatan pembelajaran maupun kegiatan non-akademik. Sebagai evaluator, kepala sekolah berperan dalam memantau, menilai, dan mengevaluasi sejauh mana nilai-nilai antikorupsi telah diinternalisasi dalam lingkungan sekolah. Evaluasi dilakukan secara sistematis dan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan untuk memperbaiki program serta menciptakan budaya sekolah yang semakin baik dari waktu ke waktu.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Atqiya, A. B., Dewi, C. K., & Faisal, C. M. (2023). Peran Kepemimpinan Dalam Mengakselerasi Penanganan Korupsi Di Era Digitalisasi 5.0. In *Gunung Djati Conference Series* (Vol. 36, pp. 403-412).
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2020). *Modul Pendidikan Antikorupsi untuk Pendidikan Dasar dan Menengah*. Jakarta: KPK RI.
- Kurniawan, S. (2013). *Pendidikan Karakter*. Yogyakarta: Arruz Media.
- Lestari, I. D. (2019). Implementasi Komunikasi Efektif Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Motivasi Kerja Guru di SDN Mekarjaya 30 Depok. *SAP (Susunan Artikel Pendidikan)*, 3(3).
- Miles, M.B, Huberman, A.M, & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3*. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa, E. (2013). *Pengembangan dan implementasi kurikulum 2013*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Munawaroh, S., Nailufar, R., & Nabilah, S. (2023). Peran Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Membangun Ekosistem Anti Korupsi di Era Society 5.0. In *Gunung Djati Conference Series* (Vol. 36, pp. 47-60).
- Nugroho, A. (2021). Keteladanan Kepala Sekolah dalam Menanamkan Nilai Antikorupsi di Sekolah Menengah Pertama. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 11(1), 45–56.

**Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
Sekolah Tinggi Islam Blambangan (STIB) Banyuwangi**

- Nurudin, N., Fauzi, M. A. N., & Barory, C. (2024). Pendidikan Anti Korupsi: Konsep Pendidikan Karakter Dan Tantangannya. *Educatus*, 2(1), 19-26.
- Schein, E. H. (2010). *Organizational culture and leadership* (Vol. 2). John Wiley & Sons.
- Siregar, A. A., & Chastanti, I. (2022). Implementasi Pendidikan Antikorupsi di Sekolah. *Sosial Horizon: Jurnal Pendidikan Sosial*, 9(1), 13-22.
- Slamet, S. (2022). Peran Kepala Sekolah dalam Membangun Citra Publik pada Era 5.0 di Kabupaten Banyuwangi. *DIAJAR: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, 1(3), 268-273.
- Slamet, S., Fitria, M., & Irawan, V. W. E. (2024). Peran Guru PAI dalam Membentuk Karakter Peserta Didik di SMK NU Darussalam Kecamatan Srono. *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam*, 2(3), 298-305.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suyatno. (2015). Budaya Sekolah dan Implementasi Pendidikan Karakter. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 21(3), 253–264.
- Tantini, T., & Utama, M. P. (2015). *Kepemimpinan Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Klaten Tahun 2015/2016* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Tilaar, H. A. R. (2009). *Kekuasaan Pendidikan: Kajian Menejemen Pendidikan. Nasional dalam Pusaran Kekuasaan*. Jakarta: Rinika Cipta.
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications Design and Methods (Sixth Editions)*. Singapore: SAGE Publications.